LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BA.018 SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2018

Kementerian Pertanian

Badan Karantina Pertanian

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang

I. Sutan Syahrir No. 267 Mata Air, Padang, Sumatera Barat

Telp/Fax : 0751 62560, Email : bkp_kls1_padang@yahoo.co.id

Website : www.karantinapadang.org

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Padang, April 2019
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel v

Daftar Lampiran vii

Pernyataan Tanggung Jawab viii

Ringkasan Laporan Keuangan 1

I Laporan Realisasi Anggaran 1

II Neraca 1

III Laporan Operasional 1

IV Laporan Perubahan Ekuitas 2

V Catatan atas Laporan Keuangan 2

A Penjelasan Umum 7

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang 7

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 7

A.3 Basis Akutansi 7

A.4 Dasar Pengukuran 7

A.5 Kebijakan Akutansi 8

(1) Pendapatan – LRA 8

(2) Pendapatan – LO 8

(3) Belanja 9

(4) Beban 9

(5) Aset 9

a. Aset Lancar 9

b. Aset Tetap 10

c. Penyusutan Aset Tetap 11

d. Piutang Jangka Panjang 11

e. Aset Lainnya 12

(6) Kewajiban 12

(7) Ekuitas 12

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali 13

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 14

B.1 Pendapatan 14
B.2 Belanja 15
B.2.1 Belanja Pegawai 16
B.2.2 Belanja Barang 17
B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18
B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 19
B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 19
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca 21
C.1 Aset Lancar 21
C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan 21
C.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 21
C.1.3 Persediaan 21
C.2 Aset Tetap 23
C.2.1 Tanah 23
C.2.2 Peralatan dan Mesin 23
C.2.3 Gedung dan Bangunan 25
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 25
C.2.5 Aset Tetap Lainnya 26
C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 26
C.3 Aset Lainnya 27
C.3.1 Aset Lain-lain 27
C.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 27
C.4 Kewajiban Jangka Pendek 28
C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga 28
C.4.2 Uang Muka dari KPPN 28
C.5 Ekuitas 29
C.5.1 Ekuitas 29
D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 29
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 29
D.2 Beban Pegawai 29
D.3 Beban Persediaan 30
D.4 Beban Barang dan Jasa 31
D.5 Beban Pemeliharaan 31
D.6 Beban Perjalanan Dinas 32

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi 32
D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 33
E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 34
E.1 Ekuitas Awal 34
E.2 Surplus/Defisit-LO 34
E.3 Transaksi Antar Entitas 34
E.4 Ekuitas Akhir 34
F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya 35
F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 35
F.2 Pengungkapan Lain-lain 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Realisasi Anggaran	3
Tabel 2	Neraca	4
Tabel 3	Laporan Operasional	5
Tabel 4	Laporan Perubahan Ekuitas	6
Tabel 5	Penghitungan penyisihan	10
Tabel 6	Masa Manfaat	11
Tabel 7	Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja	14
Tabel 8	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	14
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	15
Tabel 10	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018	15
Tabel 11	Realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Semester II tahun anggaran 2018	16
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	16
Tabel 13	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	17
Tabel 14	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	17
Tabel 15	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	18
Tabel 16	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	19
Tabel 17	Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	20
Tabel 18	Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	21
Tabel 19	Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	21
Tabel 20	Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	22
Tabel 21	Mutasi nilai tanah	23
Tabel 22	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018	23
Tabel 23	Mutasi nilai Peralatan dan Mesin	24
Tabel 24	Mutasi nilai Gedung dan Bangunan	25
Tabel 25	Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	25

Tabel 26	Mutasi aset tetap lainnya	26
Tabel 27	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	26
Tabel 28	Mutasi nilai aset lain – lain	27
Tabel 29	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	27
Tabel 30	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	28
Tabel 31	Uang Muka dari KPPN	28
Tabel 32	Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	29
Tabel 33	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	30
Tabel 34	Perbandingan Beban Persediaan per 301 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	30
Tabel 35	Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	31
Tabel 36	Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	32
Tabel 37	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	32
Tabel 38	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	33
Tabel 39	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	33
Tabel 40	Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Neraca Percobaan Akrual	36
Lampiran 2	Neraca Percobaan Kas	39
Lampiran 3	Laporan Operasional	42
Lampiran 4	Laporan Perubahan Ekuitas	44
Lampiran 5	Neraca Tahunan	45
Lampiran 6	Laporan Realisasi Anggaran	47
Lampiran 7	Laporan Kinerja	48
Lampiran 8	Daftar Transaksi Transfer Masuk/Keluar	50
Lampiran 9	Laporan Realisasi Anggaran	52
Lampiran 10	Laporan Pengembalian Belanja	60
Lampiran 11	Laporan Realisasi Pendapatan	61
Lampiran 12	Laporan Pengembalian Pendapatan	63
Lampiran 13	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	64
Lampiran 14	Rincian Kertas Karja Satker (POK)	72
Lampiran 15	Opname Fisik	85
Lampiran 16	Intrakomptabel	92
Lampiran 17	Ekstrakomptabel	103
Lampiran 18	Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	105
Lampiran 19	Neraca SIMAK BMN	116
Lampiran 20	Surat Keputusan Rumah Dinas	118
Lampiran 21	Surat Keputusan Pengelola Anggaran	121
Lampiran 22	Lampiran Data Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	136
Lampiran 23	Lampiran Form Isian Workshop LK TA 2018	146
Lampiran 24	Daftar Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana	154
Lampiran 25	Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	162
Lampiran 26	Berita Acara Hasil Workshop PNBP	163
Lampiran 27	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran	167
Lampiran 28	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Penerima	168
Lampiran 30	Catatan Hasil Reviu	169
Lampiran 31	Data Akrual	171

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, April 2019
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Semester II Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.317.386.709,00 atau mencapai 135,41% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 972.901.000,00.

Realisasi Belanja Negara (netto) pada Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp 8.230.164.227,00 atau mencapai 99,69% dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.255.616.000,00.

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018.

Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 26.932.827.030,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 227.737.170,00; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 26.696.370.148,00; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp 8.719.712,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 38.774.871,00 dan Rp 26.894.052.159,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.258.876.090,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 7.726.393.129,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp -6.476.517.039,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp 41.554.458,00 dan Defisit Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp -6.425.962.581,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp 26.390.366.722,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp -6.425.962.581,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 6.929.648.018,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp 26.894.052.159,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 1

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018			31 Desember 2017
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	972,901,000.00	1,317,386,709.00	135.41	1,382,302,101.00
Jumlah Pendapatan		**972,901,000.00**	**1,317,386,709.00**	**135.41**	**1,382,302,101.00**
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	3,853,341,000.00	3,853,303,881.00	100.00	3,799,836,691.00
Belanja Barang	B.2.2	2,864,275,000.00	2,855,558,346.00	99.70	3,055,694,999.00
Jumlah Belanja Operasi		**6,717,616,000.00**	**6,708,862,227.00**	**99.87**	**6,855,531,690.00**
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	828,000,000.00	813,454,000.00	98.24	373,520,700.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	421,500,000.00	420,288,000.00	99.71	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	288,500,000.00	287,560,000.00	99.67	9,999,360.00
Jumlah Belanja Modal		**1,538,000,000.00**	**1,521,302,000.00**	**98.91**	**383,520,060.00**
Jumlah Belanja		**8,255,616,000.00**	**8,230,164,227.00**	**99.69**	**7,239,051,750.00**

Padang, Januari 2019
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

II. NERACA

Tabel 2

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0,00	2.156.460,00
Persediaan	C.1.3	227.737.170,00	221.147.896,00
Jumlah Aset Lancar		**227.737.170,00**	**223.304.356,00**
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1	11.437.873.000,00	11.437.873.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8.226.091.639,00	8.578.034.139,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	13.178.560.100,00	12.758.272.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.498.825.300,00	1.211.265.300,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	1.606.000,00	2.505.700,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.6	-6.754.519.085,00	-7.322.108.474,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.6	-662.390.838,00	-321.267.911,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.6	-229.675.968,00	-160.362.684,00
Jumlah Aset Tetap		**26.696.370.148,00**	**26.184.211.170,00**
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	1.114.191.200,00	38.454.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.3.2	-1.105.471.488,00	-38.454.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**8.719.712,00**	**0,00**
Jumlah Aset		**26.932.827.030,00**	**26.407.515.526,00**
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	38.774.871,00	17.148.804,00
Uang Muka dari KPPN	C.4.2	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**38.774.871,00**	**17.148.804,00**
Jumlah Kewajiban		**38.774.871,00**	**17.148.804,00**
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	26.894.052.159,00	26.390.366.722,00
Jumlah Ekuitas		**26.894.052.159,00**	**26.390.366.722,00**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**26.932.827.030,00**	**26.407.515.526,00**

Padang, Januari 2019
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

III. LAPORAN OPERASIONAL

Tabel 3

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.258.876.090,00	1.376.097.062,00
JUMLAH PENDAPATAN		**1.258.876.090,00**	**1.376.097.062,00**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.863.090.393,00	3.777.814.179,00
Beban Persediaan	D.3	261.273.525,00	288.656.905,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.488.585.616,00	1.258.678.697,00
Beban Pemeliharaan	D.5	441.840.000,00	658.859.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	684.680.285,00	761.884.381,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	986.923.310,00	833.366.236,00
JUMLAH BEBAN		**7.726.393.129,00**	**7.579.259.398,00**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**-6.467.517.039,00**	**-6.203.162.336,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	56.354.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	341.487,00	1.624.167,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	15.141.029,00	-1.170.786,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**41.554.458,00**	**453.381,00**
SURPLUS/DEFISIT – LO		**-6.425.962.581,00**	**-6.202.708.955,00**

Padang, Januari 2019
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tabel 4

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 dan 31 DESEMBER 2017

Uraian	Catatan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
EKUITAS AWAL	E.1	26.390.366.722,00	19.496.586.896,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	**-6.425.962.581,00**	**-6.202.708.955,00**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	3.665.742.282,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.2	0	3.665.742.282,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	6.929.648.018,00	9.430.746.499,00
EKUITAS AKHIR		**26.894.052.159,00**	**26.390.366.722,00**

Padang, Januari 2019
Kepala,

Ir. Joni Anwar, M.MA
NIP. 19640115 198303 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penghitungan penyisihan

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA}, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR} dinilai berdasarkan nilai nominal dan disaj ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas} bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	831,000.00	831,000.00
Pendapatan Jasa	700,000,000.00	972,070,000.00
Jumlah Pendapatan	**700,831,000.00**	**972,901,000.00**
Belanja		
Belanja Pegawai	3,599,790,000.00	3,853,341,000.00
Belanja Barang	2,728,240,000.00	2,864,275,000.00
Belanja Modal	1,400,000,000.00	1,538,000,000.00
Jumlah Belanja	**7,728,030,000.00**	**8,255,616,000.00**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.317.386.709,00 atau mencapai 135,41% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 972.901.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2018		
Akun Pendapatan	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0.00	56,354,000.00	0
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung ,dan Bangunan	831,000.00	917,350.00	110.39
425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	972,070,000.00	1,156,645,200.00	118.99
425699 Pendapatan Jasa Lainnya	0.00	103,470,000.00	0
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	159.00	0.00
Jumlah	**972,901,000.00**	**1,317,386,709.00**	**135.41**

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2018 mengalami penurunan sebesar -4,70 % dibandingkan Semester II TA 2017. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0.00	792,450.00	0.00
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	56,354,000.00	0.00	0.00
425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung ,dan Bangunan	917,350.00	0.00	0.00
425215 Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0.00	1,381,509,651.00	-100.00
425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1,156,645,200.00	0.00	0.00
425699 Pendapatan Jasa Lainnya	103,470,000.00	0.00	0.00
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	159.00	0.00	0.00
Jumlah	**1,317,386,709.00**	**1,382,302,101.00**	**-4.70**

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja (netto) pada Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp 8.230.164.227,00 atau 99,69% dari anggaran belanja sebesar Rp 8.255.616.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2018		
Akun Belanja	**Anggaran**	**Realisasi**	**.%**
Belanja Pegawai	3,853,341,000.00	3,853,303,881.00	100.00
Belanja Barang	2,864,275,000.00	2,855,558,346.00	99.70
Belanja Modal	1,538,000,000.00	1,521,302,000.00	98.91
Total Belanja Kotor	**8,255,616,000.00**	**8,230,164,227.00**	**99.69**
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Total Belanja	**8,255,616,000.00**	**8,230,164,227.00**	**99.69**

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Semester II tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 11 Realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Semester II tahun anggaran 2018

Uraian	31 Desember 2018		
Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	8,255,616,000.00	8,230,164,271.00	99.69
Total Belanja Kotor	**8,255,616,000.00**	**8,230,164,271.00**	**99.69**
Pengembalian Belanja	0	44.00	0.00
Total Belanja	**8,255,616,000.00**	**8,230,164,227.00**	**99.69**

Dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2017, Realisasi Belanja Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 13,69% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kenaikan pada belanja pegawai dan belanja modal untuk meningkatkan pelayanan pada kantor Wilker Bandar Udara Minangkabau.

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	.%
Belanja Pegawai	3,853,303,881.00	3,799,836,691.00	1.41
Belanja Barang	2,855,558,346.00	3,055,694,999.00	-6.55
Belanja Modal	1,521,302,000.00	383,520,060.00	296.67
Total Belanja	**8,230,164,227.00**	**7,239,051,750.00**	**13.69**

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.853.303.881,00 dan Rp 3.799.836.691,00. Realisasi belanja Semester II TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 1,41% dari Semester II TA 2017. Hal ini disebabkan kenaikan tunjangan suami/istri, anak, jabatan fungsional tertentu, uang makan, uang lembur.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,127,879,881.00	3,161,976,935.00	-1.08
Belanja Lembur	725,424,000.00	640,760,000.00	13.21
Jumlah Belanja Kotor	**3,853,303,881.00**	**3,802,736,935.00**	**1.33**
Pengembalian Belanja Pegawai	0	2,900,244.00	0.00
Jumlah Belanja	**3,853,303,881.00**	**3,799,836,691.00**	**1.41**

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.855.558.346,00 dan Rp 3.055.694.999,00. Realisasi belanja barang Semester II TA 2018 mengalami penurunan sebesar -6,55% dari Semester II TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Realisasi belanja barang operasional, non operasional dan Jasa terjadi kenaikan yang digunakan untuk pelayanan operasional karantina dan peningkatan SDM.
2. Realisasi belanja persediaan, pemeliharaan dan perjalanan dalam negeri terjadi penurunan dikarenakan berkurangnya sarana dan prasarana yang penunjang tindakan karantina.

Tabel 14 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	842.053.302,00	750.169.867,00	12,25
Belanja Barang Non Operasional	160.625.000,00	101.710.000,00	57,92
Belanja Barang Persediaan	265.792.000,00	377.000.000,00	-29,50
Belanja Jasa	460.567.759,00	406.071.751,00	13,42
Belanja Pemeliharaan	441.840.000,00	658.859.000,00	-32,94
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	684.680.285,00	761.884.381,00	-10,13
Jumlah Belanja Kotor	**2.855.558.346,00**	**3.055.694.999,00**	**-6,55**
Pengembalian Belanja Barang	**0**	**0**	**0,00**
Jumlah Belanja	**2.855.558.346,00**	**3.055.694.999,00**	**-6,55**

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 813.454.000,00 dan Rp 373.520.700,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 117,78% dibandingkan Semester II TA 2017. Peruntukan penggunaan belanja modal peralatan dan mesin untuk sarana pelayanan operasional karantina.

Tabel 15 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	813.454.000,00	373.520.700,00	117,78
Jumlah Belanja Kotor	**813.454.000,00**	**373.520.700,00**	**117,78**
Pengembalian Belanja	**0**	**0**	0,00
Jumlah Belanja	**813.454.000,00**	**373.520.700,00**	**117,78**

Belanja modal beralatan dan mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 813.454.000,00 terdiri dari :

-	Personal Computer	3	UNIT	27.861.600,00
-	Printer	6	UNIT	20.102.400,00
-	Perangkat pengolah data lapangan	1	UNIT	10.530.000,00
-	Camera Digital	1	UNIT	6.146.000,00
-	Sice (Sofa)	1	UNIT	28.900.000,00
-	Meja Kerja	10	UNIT	20.750.000,00
-	Kursi Besi	34	UNIT	32.900.000,00
-	Lemari Penyimpanan	2	UNIT	19.700.000,00
-	Filling Kabinet	2	UNIT	7.000.000,00
-	Pengadaan Gordyn	1	PKT	59.976.000,00
-	Partisi Ruang Laboratorium BKP Padang	1	PKT	79.500.000,00
-	Counter Pelayanan Kantor Wilker BIM	1	PKT	138.800.000,00
-	Papan Nama Wilker BIM	1	PKT	29.860.000,00
-	CCTV	1	PKT	39.965.000,00
-	AC Split	9	UNIT	105.250.000,00
-	Teralis	64	UNIT	58.932.000,00
-	Freezer	2	UNIT	27.500.000,00
-	Genset	1	UNIT	99.781.000,00
Total		**141**		**813.454.000,00**

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 420.288.000,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan Semester II TA 2017. Peruntukan penggunaan belanja modal gedung dan bangunan untuk prasarana penunjang pelayanan karantina.

Tabel 16 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.750.000,00	0,00	0,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	345.538.000,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**420.288.000,00**	**0,00**	**0,00**
Pengembalian Belanja	**0**	**0**	0,00
Jumlah Belanja	**420.288.000,00**	**0,00**	**0,00**

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebesar Rp 420.288.000,00 terdiri dari :

-	Pembangunan Lahan Parkir	1	PKT	74.750.000,00
-	Pemasangan Keramik Teras	50	M2	19.802.000,00
-	Pemasangan Paving Block	300	M2	97.398.000,00
-	Renovasi Lantai Gedung Kantor	200	M2	149.700.000,00
-	Pemasangan Paving Block Kantor BIM	178	UNIT	59.961.000,00
-	Pemasangan Keramik Teras Kantor BIM	34	M2	18.677.000,00
Total				**420.288.000,00**

B.2.5 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 287.560.000,00 dan Rp 9.999.360,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 2.875,78,00% dibandingkan Semester II TA 2017. Peruntukan penggunaan untuk peningkatan pelayanan operasional karantina.

Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	114,300,000.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jaringan	173,260,000.00	9,999,360.00	0.00
Jumlah Belanja Kotor	**287,560,000.00**	**9,999,360.00**	**2875.78**
Pengembalian Belanja	**0**	**0**	**0.00**
Jumlah Belanja	**287,560,000.00**	**9,999,360.00**	**2875.78**

Realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp 287.560.000,00 terdiri dari :

-	Pemasangan Jaringan Listrik	1	PKT	29.960.000,00
-	Instalasi Air Bersih Karantina Pertanian dan Rumah Dinas	2	PKT	88.650.000,00
-	Pembuatan Parit/ Selokan Depan Gedung Kantor	80	M2	64.334.000,00
-	Pembuatan Parit / Selokan Keliling Gedung Kantor	77	M2	49.966.000,00
-	Jaringan Internet	1	PKT	54.650.000,00
Total				**287.560.000,00**

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 2.156.460,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 18 Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Pendapatan Sensor/Karantina, Pemeriksaan/Pengawasan	0,00	2.156.460,00	-100,00
Jumlah	**0,00**	**2.156.460,00**	**-100,00**

C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari uang muka dari KPPN.

Tabel 19 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Kas di Bendahara Pengeluran	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

C.1.3 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 227.737.170,00 dan Rp 221.147.896,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Persediaan	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Naik (Turun) %
Barang Konsumsi	227,737,170.00	221,147,896.00	2.98
Jumlah	**227,737,170.00**	**221,147,896.00**	**2.98**

Tabel 20 Mutasi persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 :

Saldo TA 2017 audited		**221,147,896**
	Mutasi Tambah :	282,912,500
-	Pembelian	265,792,000
-	Transfer Masuk	17,120,500
	Mutasi Kurang :	276,323,226
-	Pemakaian	261,273,525
-	Transfer Keluar	250,000
-	Barang Usang	9,801,075
-	Koreksi Penyesuaian Persediaan	4,998,626
Saldo Per 31 Desember 2018		**227,737,170**

Saldo TA 2017 audited sama dengan nilai audited yang sudah diperiksa KPKNL dan KPPN.

Penambahan

- Pembelian menggunakan MAK 521811 (Belanja barang konsumsi) untuk peningkatan pelayanan operasional karantina.
- Transfer masuk berupa penerimaan dokumen utama karantina dari seketariat Badan Karantina Pertanian.

Pengurangan

- Pemakaian berupa pemakaian ATK, bahan lab dan dokumen utama untuk pelayanan operasional karantina.
- Transfer Keluar berupa pengiriman dokumen utama karantina ke Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.
- Barang Usang berupa dokumen utama dan penunjang yang sudah tidak terpakai.
- Koreksi Penyesuaian dari selisih dari nilai pembelian.

C.2 ASET TETAP

C.2.1 TANAH

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 11.437.873.000,00 dan Rp 11.437.873.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21 Mutasi nilai tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**11.437.873.000,00**
Mutasi Tambah	
Hibah Langsung	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Saldo per 31 Desember 2018	**11.437.873.000,00**

Tabel 22 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2018

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	324,00m2	Sutan Syahrir Rt.01/01, Padang Selatan	807,975,000.00
2.	1.070,00m2	Jl. Banda Cina Rt.--, Batang Anai	356,043,000.00
3.	935,00m2	Olo Bangau Rt.-, Batang Anai	1,146,684,000.00
4.	1.385,00m2	Sutan Syahrir Rt.-, Padang Selatan	3,588,881,000.00
5.	19.000,00m2	Jl. Pasir Jambak Rt.03/VII, Koto Tangah	5,277,250,000.00
6.	1.004,00m2	Olo Bangau Rt.-, Batang Anai	261,040,000.00
Jumlah			**11,437,873,000.00**

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 8.239.591.639,00 dan Rp 8.578.034.139,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**8.578.034.139,00**
Mutasi Tambah	**805.954.000,00**
Pembelian	799.954.000,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	6.000.000,00
Mutasi Kurang	**1.157.896.500,00**
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.157.896.500,00
Saldo per 31 Desember 2018	**8.226.091.639,00**
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2018	-6.754.519.085,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**1.471.572.554,00**

Mutasi tambah yaitu :

- Pembelian

-	Personal Computer	3	UNIT	27.861.600,00
-	Printer	6	UNIT	20.102.400,00
-	Perangkat pengolah data lapangan	1	UNIT	10.530.000,00
-	Camera Digital	1	UNIT	6.146.000,00
-	Sice (Sofa)	1	UNIT	28.900.000,00
-	Meja Kerja	10	UNIT	20.750.000,00
-	Kursi Besi	34	UNIT	32.900.000,00
-	Lemari Penyimpanan	2	UNIT	19.700.000,00
-	Filling Kabinet	2	UNIT	7.000.000,00
-	Pengadaan Gordyn	1	PKT	59.976.000,00
-	Partisi Ruang Laboratorium BKP Padang	1	PKT	79.500.000,00
-	Counter Pelayanan Kantor Wilker BIM	1	PKT	138.800.000,00
-	Papan Nama Wilker BIM	1	PKT	29.860.000,00
-	CCTV	1	PKT	39.965.000,00
-	AC Split	9	UNIT	105.250.000,00
-	Teralis	64	UNIT	58.932.000,00
-	Freezer	2	UNIT	27.500.000,00
-	Genset	1	UNIT	99.781.000,00
Total		**141**		**813.454.000,00**

- Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap berupa …..

Mutasi kurang yaitu reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya dikarenakan peralatan dan mesin sudah rusak berat.

Selisih antara Pembelian sebesar Rp. 13.500.000,00 berada di Laporan Ekstrakomtable.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 13.178.560.100,00 dan Rp 12.758.272.100,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 24 Mutasi nilai Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**12,758,272,100.00**
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	74,750,000.00
Pengembangan Nilai Aset	345,538,000.00
Saldo per 31 Desember 2018	**13,178,560,100.00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-662,390,838.00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**12,516,169,262.00**

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi tambah adalah :

-	Pembangunan Lahan Parkir	1	PKT	74.750.000,00
-	Pemasangan Keramik Teras	50	M2	19.802.000,00
-	Pemasangan Paving Block	300	M2	97.398.000,00
-	Renovasi Lantai Gedung Kantor	200	M2	149.700.000,00
-	Pemasangan Paving Block Kantor BIM	178	UNIT	59.961.000,00
-	Pemasangan Keramik Teras Kantor BIM	34	M2	18.677.000,00
Total				**420.288.000,00**

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.498.825.300,00 dan Rp 1.211.265.300,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25 Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**1,211,265,300.00**
Mutasi Tambah	
Pembelian	54,650,000.00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	232,910,000.00
Saldo per 31 Desember 2018	**1,498,825,300.00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-229,675,968.00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**1,269,149,332.00**

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

-	Pemasangan Jaringan Listrik	1	PKT	29.960.000,00
-	Instalasi Air Bersih Karantina Pertanian dan Rumah Dinas	2	PKT	88.650.000,00
-	Pembuatan Parit/ Selokan Depan Gedung Kantor	80	M2	64.334.000,00
-	Pembuatan Parit / Selokan Keliling Gedung Kantor	77	M2	49.966.000,00
-	Jaringan Internet	1	PKT	54.650.000,00
Total				**287.560.000,00**

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.606.000,00 dan Rp 2.505.700,00. Mutasi aset tetap lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 26 Mutasi aset tetap lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**2.505.700,00**
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-899.700,00
Saldo per 31 Desember 2018	**1.606.000,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**1.606.000,00**

C.2.6 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp -7.646.585.891,00 dan Rp -7.803.739.069,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	11.437.873.000,00	0,00	11.437.873.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.239.591.639,00	-6.754.519.085,00	1.485.072.554,00
3	Gedung dan Bangunan	13.178.560.100,00	-662.390.838,00	12.516.169.262,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.498.825.300,00	-229.675.968,00	1.269.149.332,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.606.000,00	0	1.606.000,00
Akumulasi Penyusutan		**34.356.456.039,00**	**-7.646.585.891,00**	**26.709.870.148,00**

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.114.191.200,00 dan Rp 38.454.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tabel 28 Mutasi nilai aset lain - lain

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017	**38,454,000.00**
Mutasi Tambah	**1,158,796,200.00**
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1,158,796,200.00
Mutasi Kurang	**-83,059,000.00**
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-77,059,000.00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya	-6,000,000.00
Saldo per 31 Desember 2018	**1,114,191,200.00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	-1,105,471,488.00
Nilai Buku per 31 Desember 2018	**8,719,712.00**

Mutasi tambah merupakan aset tetap dari peralatan dan mesin yang rusak berat dan dihentikan penggunaannya.

Mutasi kurang adalah usulan barang rusak berat ke pengelola (BMN yang dihentikan) yang sudah dilelang dan sudah diusulkan penghapusan data ke pusat dan penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaannya.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp -1.105.471.488,00 dan Rp -38.454.000,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lainnya	1,114,191,200.00	-1,105,471,488.00	8,719,712.00
Akumulasi Penyusutan		**1,114,191,200.00**	**-1,105,471,488.00**	**8,719,712.00**

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 38.774.871,00 dan Rp 17.148.804,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	11.120.000,00	1.333.488,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	27.654.871,00	15.815.316,00
Jumlah	**38.774.871,00**	**17.148.804,00**

a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan pegawai Bulan Desember 2018;

b. Belanja barang yang masih harus dibayar berupa langganan listrik, telepon dan internet.

C.4.2 UANG MUKA DARI KPPN

Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Uang muka dari KPPN merupakan uang kas di bendahara pengeluaran yang dikelola dan dipergunakan untuk operasional.

Tabel 31 Uang Muka dari KPPN

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 26.894.052.159,00 dan Rp 26.390.366.722,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.258.876.090,00 dan Rp 1.376.097.062,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 32 Perbandingan PNBP Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	0.00	1,375,304,612.00	-100.00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1,154,488,740.00	0.00	0.00
Pendapatan Jasa Lainnya	103,470,000.00	0.00	0.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	917,350.00	792,450.00	15.76
Jumlah	**1,258,876,090.00**	**1,376,097,062.00**	**-8.52**

Penurunan pada pendapatan jasa karantina pertanian dan peternakan dikarenakan menurunnya lalu lintas komoditi pertanian.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 3.863.090.393,00 dan Rp 3.777.814.179,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 33 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	2,092,339,700.00	2,147,287,800.00	-2.56
Beban Pembulatan Gaji PNS	32,815.00	34,590.00	-5.13
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149,282,800.00	137,581,940.00	8.50
Beban Tunj. Anak PNS	45,517,922.00	45,355,334.00	0.36
Beban Tunj. Struktural PNS	47,340,000.00	43,920,000.00	7.79
Beban Tunj. Fungsional PNS	252,290,000.00	219,745,000.00	14.81
Beban Tunj. PPh PNS	2,355,856.00	6,152,255.00	-61.71
Beban Tunj. Beras PNS	120,579,300.00	126,952,260.00	-5.02
Beban Uang Makan PNS	392,793,000.00	366,845,000.00	7.07
Beban Tunjangan Umum PNS	35,135,000.00	43,180,000.00	-18.63
Beban Uang Lembur	725,424,000.00	640,760,000.00	13.21
Jumlah	**3,863,090,393.00**	**3,777,814,179.00**	**2.26**

Realisasi belanja pegawai terjadi kenaikan pada Semester II tahun anggaran 2018 sebesar 2,26% dikarenakan kenaikan tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, uang makan dan uang lembur.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 261.273.525,00 dan Rp 288.656.905,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Perbandingan Beban Persediaan per 301 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Persediaan konsumsi	261,273,525.00	288,656,905.00	-9.49
Jumlah	**261,273,525.00**	**288,656,905.00**	**-9.49**

Penurunan pada beban persediaan sebesar -9,49% dikarenakan penurunan kegiatan operasional.

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 1.488.585.616,00 dan Rp 1.258.678.697,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Keperluan Perkantoran	520.732.912,00	440.101.867,00	18,32
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	154.224.000,00	161.568.000,00	-4,55
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.156.390,00	6.000.000,00	2,61
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160.940.000,00	137.500.000,00	17,05
Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	5.000.000,00	-100,00
Beban Bahan	160.625.000,00	101.710.000,00	57,92
Beban Langganan Listrik	216.634.682,00	189.396.436,00	14,38
Beban Langganan Telepon	5.286.508,00	8.757.036,00	-39,63
Beban Langganan Air	10.857.800,00	7.431.358,00	46,11
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	162.628.324,00	103.054.000,00	57,81
Beban Sewa	30.000.000,00	43.500.000,00	-31,03
Beban Jasa Profesi	36.000.000,00	5.400.000,00	566,67
Beban Jasa Lainnya	11.000.000,00	49.260.000,00	-77,67
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**1.488.585.616,00**	**1.258.678.697,00**	**18,27**

Kenaikan pada beban barang dan jasa sebesar 17,19% dikarenakan peningkatan pada belanja keperluan kantor, pengiriman surat dinas pos pusat, honor operasional satuan kerja, bahan, langganan listrik, langganan air, jasa profesi serta jasa lainnya.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 441.840.000,00 dan Rp 658.859.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66,577,000.00	196,049,000.00	-66.04
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	375,263,000.00	462,810,000.00	-18.92
Jumlah	**441,840,000.00**	**658,859,000.00**	**-32.94**

Penurunan pada beban pemeliharaan sebesar -32,94% dikarenakan berkurangnya aset yang akan dipelihara.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 684.680.285,00 dan Rp 761.884.381,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	270,000,690.00	291,879,404.00	-7.50
Beban Perjalanan Tetap	126,730,000.00	179,755,000.00	-29.50
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,950,000.00	9,000,000.00	221.67
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	258,999,595.00	281,249,977.00	-7.91
Jumlah	**684,680,285.00**	**761,884,381.00**	**-10.13**

Penurunan pada beban perjalanan dinas sebesar -10,13% karena menurunnya pemeriksaan dan pengawasan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran.

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 989.623.310,00 dan Rp 833.366.236,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi untuk 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	577,670,966.00	477,941,824.00	20.87
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	341,122,927.00	307,877,434.00	10.80
Beban Penyusutan Irigasi	14,949,324.00	3,601,620.00	315.07
Beban Penyusutan Jaringan	54,363,960.00	43,945,358.00	23.71
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,516,133.00	0.00	0.00
Jumlah	**989,623,310.00**	**833,366,236.00**	**18.75**

Kenaikan pada beban penyusutan dan amortisasi sebesar 18,75% karena berkurangnya masa manfaat aset tetap tersebut.

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	% Naik / Turun
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	56,354,000.00	0.00	0.00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	159.00	0.00	0.00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	341,328.00	1,624,167.00	-78.98
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-5,339,954.00	-1,170,786.00	356.10
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-9,801,075.00	0.00	0.00
Jumlah	**41,554,458.00**	**453,381.00**	**9065.46**

Kenaikan pada pos surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar 9065,46% karena pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin dari hasil lelang, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu dari rapel kekurangan gaji pegawai, pendapatan penyesuaian nilai persediaan, beban penyesuaian nilai persediaan dan Kerugian persediaan rusak/usang.

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 dan 01 Januari 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 26.390.366.722,00 dan Rp 19.496.586.896,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp -6.425.962.581,00 dan Rp -6.202.708.955,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 6.929.648.018,00 dan Rp 9.430.746.499,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 40 Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2018	31 Desember 2017	%
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,230,164,227.00	7,239,051,750.00	13.69
Diterima dari Entitas Lain	-1,317,386,709.00	-1,382,302,101.00	-4.70
Transfer Keluar	-250,000.00	0.00	0.00
Transfer Masuk	17,120,500.00	18,364,750.00	-6.78
Pengesahan Hibah Langsung		3,555,632,100.00	-100.00
Jumlah	**6,929,648,018.00**	**9,430,746,499.00**	**-26.52**

Penurunan pada transaksi antar entitas sebesar -26,52% karena terjadi penurunan pada transaksi diterima dari entitas lainnya, transfer masuk dan pengesahan hibah langsung.

E.4 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 26.894.052.159,00 dan Rp 26.390.366.722,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada neraca ada aset lainnya yang merupakan aset tetap yang diberhentikan kegunaannya dikarenakan rusak berat dan akan dilakukan penghapusan data pada tahun 2019.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/KU.010/01/1018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Karantina Pertanian. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Joni Anwar, M.MA
Pejabat Pembuat Komitmen	: Mhd. Ade Sapri, SE
PejabatPenandatangan/Penguji SPM	: Ahmad Yusuf, SH. MM
Bendahara Pengeluaran	: Suwarseh, SE

Sampai dengan 31 Desember 2018 Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 6 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi 1 Tanggal 30 Mei 2018
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 24 Agustus 2018
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 28 September 2018
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 30 Oktober 2018
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 23 November 2018
6. DIPA Revisi 6 Tanggal 29 November 2018